



9 772088 235001

INFO *Singkat*

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Vol. IV, No. 24/II/P3DI/Desember/2012



Rencana Redenominasi Rupiah

Achmad Sani Alhusain^{*)}

Abstrak

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi Rupiah) telah diusulkan oleh pemerintah kepada DPR sebagai prioritas Prolegnas 2013. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan tiga angka nol, tetapi nilainya tetap. Terjadi pro dan kontra. Yang pro menyatakan, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi lebih baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru, membuat operasi informasi teknologi (IT) dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana dan dapat mempercepat proses penyelesaian transaksi (settlement) perdagangan saham sehingga meningkatkan transaksi. Sedang yang kontra menyatakan, redenominasi dapat menimbulkan lonjakan inflasi sehingga dapat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sebelum penerapan redenominasi rupiah pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh. Selain itu, persiapan infrastruktur juga sangat penting untuk menghindari terjadinya inflasi.

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2010 Bank Indonesia (BI) mewacanakan rencana redenominasi rupiah. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukar uang tersebut. Misalnya, nilai Rp1.000 saat ini jika mengalami redenominasi penghilangan tiga angka nol akan menjadi Rp 1. Namun, nilainya tetap sama. Dengan kata lain, jika sekarang Rp1.000 bisa untuk membeli permen maka ketika dipotong menjadi Rp1 tetap bisa membeli permen yang sama. BI juga menegaskan, pelaksanaan redenominasi mata uang rupiah membutuhkan waktu yang panjang dan payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, BI dan pemerintah telah mengusulkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Usulan RUU tersebut telah disampaikan

langsung oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo kepada unsur Pimpinan DPR dan Badan Legislasi (Baleg) dan telah menjadi prioritas Prolegnas tahun 2013.

Menurut Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono, pemerintah telah menyiapkan naskah akademik sekaligus draf RUU tersebut. Menurutnya, redenominasi perlu dilakukan untuk memperkuat kurs rupiah terhadap mata uang asing. Redenominasi juga dimaksudkan untuk menyederhanakan mata uang dan bukan untuk memotong nilai mata uang. Redenominasi juga diperlukan oleh negara yang sedang menuju level negara maju. Namun sebelum pembahasan, Baleg meminta pemerintah menyosialisasikan secara penuh kepada masyarakat untuk menghindari kekeliruan masyarakat dalam menafsirkan redenominasi sebagai pemotongan nilai mata uang.

^{*)} Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sani_alhusain@yahoo.com

B. Pengalaman Negara Lain

Sejumlah negara terhitung pernah sukses melakukan redenominasi mata uang, baik dengan menghilangkan angka nol, maupun menambahkannya. Salah satu negara yang sukses tersebut adalah Turki. Turki dinilai sukses melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol pada mata uangnya. Redenominasi dilakukannya dengan mengubah 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2005. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi sejak tahun 1970-an.

Banyak negara yang mengalami hiperinflasi dan akhirnya melakukan redenominasi. Untuk kasus Indonesia, rencana redenominasi dilakukan tidak karena hiperinflasi, namun semata-mata untuk menyederhanakan. Berikut daftar beberapa negara yang sukses melakukan redenominasi mata uangnya, baik dengan menambah ataupun mengurangi angka nol dalam pecahan uangnya.

NEGARA	KEBIJAKAN REDENOMINASI	TAHUN PELAKSANAAN
Islandia	menghilangkan 2 angka nol dalam 1 kali operasi	1981
Rusia	menghilangkan 3 angka nol dalam 3 kali operasi	1947, 1961 dan 1998
Meksiko	menghilangkan 3 angka nol dalam 1 kali operasi	1993
Polandia	menghilangkan 4 angka nol dalam 1 kali operasi	1995
Ukraina	menghilangkan 5 angka nol dalam 1 kali operasi	1996
Peru	menghilangkan 6 angka nol melalui 2 kali operasi	1985 dan 1991
Bolivia	menghilangkan 9 angka nol melalui 2 kali operasi	1963 dan 1987

C. Perbedaan Redenominasi dengan Sanering

Ada pandangan yang rancu dalam masyarakat mengenai perbedaan antara redenominasi dengan sanering. Untuk mencegah salah pengertian ini, BI menjelaskan perbedaannya secara rinci sebagai berikut:

ASPEK	REDENOMINASI	SANERING
Pengertian	Menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misal Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.	Pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.
Dampak bagi Masyarakat	tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama.	menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi. mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. 	mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).
Nilai uang terhadap barang	nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.	nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.
Kondisi saat dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> dilakukan saat kondisi makro ekonomi stabil. Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat. inflasi sangat tinggi (hiperinflasi).
Masa transisi	dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.	tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.
Contoh untuk harga 1 liter bensin seharga Rp 4.500 per liter.	bila terjadi redenominasi tiga digit (tiga angka nol), maka dengan uang sebanyak Rp4,5 tetap dapat membeli 1 liter bensin. Karena harga 1 liter bensin juga dinyatakan dalam satuan pecahan yang sama (baru).	bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp4,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 liter bensin.

D. Pro dan Kontra

Rencana redenominasi rupiah disambut positif oleh beberapa kalangan. Menurut Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi lebih baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito menilai, redenominasi dapat membuat operasi IT dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana. Redenominasi juga dapat mempercepat proses *settlement* perdagangan saham di BEI karena redenominasi akan memperkecil jumlah angka dari setiap transaksi yang dilakukan investor. Transaksi yang dilakukan oleh investor asing juga dapat meningkat karena mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan satuan nilai rupiah yang lebih sederhana.

Menurut Anggota Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, inisiatif pemerintah itu harus didukung seluruh pelaku ekonomi sehingga dapat diterima dan dijalankan tanpa hambatan. Undang-undang redenominasi harus dapat mencakup seluruh aspek pelaku ekonomi dan industri. Sedang menurut pengamat ekonomi, Mirza Adityazwara, syarat redenominasi bisa dilaksanakan adalah pada saat situasi ekonomi dan politik stabil serta inflasi rendah. Kendati demikian, diperlukan persiapan dan sosialisasi yang baik, dan masa transisi yang cukup panjang.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik, Djamal mengharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi redenominasi hingga ke pelosok Tanah Air. Hal ini penting demi mencegah spekulasi mengambil keuntungan dari masyarakat yang tidak mendapatkan informasi. Pemahaman redenominasi tidak bisa hanya sekedar di tingkat masyarakat kota, kalangan perbankan, dan pegawai perkantoran tetapi masyarakat daerah pun harus tahu apa itu redenominasi.

Sebaliknya, menurut Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, redenominasi bisa mengakibatkan inflasi, karena kemungkinan terjadi pembulatan harga barang ke atas seiring redenominasi.

Resiko inflasi harus diwaspadai sedini mungkin dari pemberlakuan redenominasi. Menurut Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, kesiapan infrastruktur penentu kelangsungan penerapan redenominasi harus diperhatikan: *Pertama*, kesiapan mata uang baru dalam pecahan sen. Hal ini untuk menghindari terjadinya lonjakan inflasi. Contoh, harga barang senilai Rp1.100 akan menjadi Rp1,1 setelah redenominasi. Apabila, tidak ada ketersediaan mata uang baru satuan sen, harga barang akan mengalami pembulatan menjadi Rp2 sehingga mengalami kenaikan hampir 100%. *Kedua*, BI harus menyiapkan infrastruktur penyalur pecahan mata uang baru, misalnya kantor cabang BI di daerah. Pemerintah juga harus menyosialisasikan redenominasi secara benar ke masyarakat, karena saat ini terdapat kebingungan masyarakat antara redenominasi dengan senering.

Lana juga mengingatkan, pencapaian tingkat inflasi yang saat ini mencapai 4,32% masih dibantu subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan harga komoditas yang turun. Jika ke depan subsidi BBM dinaikkan atau dicabut, akan sangat menentukan jumlah inflasi. Oleh karena itu, pelaksanaan redenominasi harus diperhitungkan kembali. Meskipun redenominasi belum penting untuk diterapkan saat ini, tetapi dia mengakui beberapa keuntungan yang didapat dari redenominasi. Upaya ini akan sangat memudahkan pencatatan nominal harga dalam neraca keuangan dan mendukung persaingan dalam Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 mendatang sehingga nantinya satu dolar AS itu bukan Rp9.000 melainkan Rp9. Tetapi, nilainya semu karena fundamentalnya tidak berubah, hanya penghilangan nol saja.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto menilai Indonesia belum tepat menerapkan kebijakan redenominasi. Sebab, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh masyarakat miskin yang berjumlah 70 juta jiwa. Masyarakat miskin belum siap dengan penyederhanaan angka rupiah yang menghilangkan tiga angka nol. Ia memprediksi dampaknya bagi masyarakat miskin akan menimbulkan persepsi nilai uang berkurang. Redenominasi hanya akan memicu kenaikan inflasi. Sementara

tingkat inflasi Indonesia masih terkendali. Redominasi hanya cocok untuk negara-negara yang mengalami hiperinflasi. Airlangga menjelaskan, pemerintah baru bisa melakukan redenominasi saat masyarakat Indonesia sudah mampu keluar dari *middle income trap* (jebakan negara berkembang), dan jumlah masyarakat miskin menurun signifikan.

Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Dody Budi Waluyo menjelaskan, untuk mengurangi resiko Inflasi yang berlebihan, BI akan mengeluarkan mata uang rupiah baru hingga ke satuan sen. Sedang Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Perry Warjiyo menjelaskan, dalam pelaksanaan redenominasi, pemerintah dan BI akan mewajibkan pencantuman harga di toko-toko dan pasar. Pencantuman harga dalam dua bentuk, yakni dalam rupiah lama dan baru (*dual price tagging*).

Dengan mempertimbangkan beberapa pendapat di atas, maka redenominasi rupiah diperlukan dalam rangka menyederhanakan mata uang rupiah tanpa mengurangi nilai rupiah itu sendiri. Namun demikian, rencana redenominasi ini harus melalui pengkajian yang matang dan dilakukan dengan hati-hati. Penyiapan infrastruktur berupa penyediaan mata uang dalam pecahan kecil sangat diperlukan untuk meredam terjadinya lonjakan inflasi akibat pembulatan-pembulatan pecahan kecil rupiah. Tentunya sosialisasi yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan serta daerah terpencil dan perbatasan Indonesia harus dilakukan untuk memberikan pemahaman redenominasi yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan keresahan.

E. Penutup

Redenominasi merupakan kebijakan strategis untuk menyederhanakan rupiah dalam pengadministrasian dan salah satu upaya menyetarakan harga rupiah dengan mata uang asing. Upaya penyederhanaan rupiah harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sehingga tidak merugikan masyarakat.

Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur redenominasi rupiah dan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. DPR perlu dengan seksama mencermati apa yang telah dirumuskan dan diusulkan pemerintah dalam RUU Perubahan Harga Rupiah. Sosialisasi kebijakan ini hendaknya tidak hanya dilakukan pemerintah saja, namun DPR mendampingi, untuk mengetahui secara pasti respon masyarakat akan kebijakan ini.

Rujukan:

1. "Redenominasi Belum Tepat Diterapkan," *Koran Tempo*, 14 Desember 2012.
2. "Redenominasi Berpeluang Picu Inflasi Tinggi," *Media Indonesia*, 13 Desember 2012.
3. "Pemerintah akan mensosialisasikan Redenominasi," *Koran Tempo*, 11 Desember 2012.
4. "BI Jamin Redenominasi tidak Dorong Inflasi," *Media Indonesia*, 10 Desember 2012.
5. "BI Wajib Siapkan Infrastruktur Redenominasi," *Media Indonesia*, 10 Desember 2012.
6. "Rp 1.000 Jadi Rp 1 Bisa Diwujudkan," *Kompas*, 8 Desember 2011.
7. "Redenominasi Rupiah Jangan Gagal," *Kompas*, 8 Desember 2012.
8. "BEI Dukung Redenominasi," *Media Indonesia*, 08 Desember 2012.
9. "Masa Transisi redenominasi Butuh Tahunan," *Koran Tempo*, 10 Desember 2012.
10. "RUU Redenominasi Prioritas pada 2013," *Kompas*, 30 November 2012.
11. "Bank Dunia Sambut Positif Redenominasi Rupiah," *Kompas*, 14 Desember 2011.
12. "Sosialisasi Redenominasi Rupiah Harus Sampai Pelosok," *Kompas*, 12 Desember 2011.
13. "BI: Redenominasi Perlu Waktu Panjang," *Kompas*, 27 Agustus 2010
14. "Ini Dia Negara-negara yang Sukses Terapkan Redenominasi Mata Uang," <http://www.detik.com>, 31 Oktober 2012, diakses tanggal 14 Desember 2012.
15. "Perbedaan Redenominasi Rupiah dengan Sanering Rupiah," <http://www.redenominasirupiah.com>, diakses 14 Desember 2012.